

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sungai adalah aliran air permukaan yang berbentuk memanjang dan mengalir terus menerus dari hulu ke hilir. Secara umum, Sungai terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian hulu, Tengah, dan bagian hilir. Tentunya masing-masing bagian memiliki ciri sendiri untuk membedakan ketiganya. Sungai merupakan bagian permukaan bumi yang letaknya lebih rendah dari tanah dan menjadi tempat mengalirnya air tawar menuju ke laut, danau, atau Sungai, (Hamzah, 2009). Sungai merupakan ekosistem yang didalamnya terdapat keseimbangan inflow dan outflow dari material dan energi. Namun, jika fungsi dari ketiga bagian Sungai mengalami gangguan, maka system hidrologi akan terganggu dan berdampak pada aliran permukaan (*run off*) yang tinggi.

Seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, dalam Pasal 1 Ayat 4 yang menyebutkan bahwa pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Maka dari itu, pengelolaan dan pemeliharaan Sungai sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan dan pendayagunaan Sungai sebagai salah satu sumber kebutuhan masyarakat secara umum.

Terjaganya kualitas aliran Sungai yang ada menjadi salah satu fungsi Pemerintah Indonesia atas keberlangsungan hal tersebut. Banyaknya dampak negatif yang muncul membuat terganggunya fungsi aliran Sungai bagi kehidupan, secara fungsi dan kegunaan bahwa aliran Sungai sangat memberi manfaat bagi keberlangsungan kehidupan seperti penggunaan untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian serta kebutuhan lain yang memang di gantungkan pada ketersediaan aliran Sungai tersebut. Keberlangsungan serta ketersediaan aliran Sungai yang ada

harus tetap terjaga sehingga secara fungsi jangka Panjang bisa terus terasa bagi setiap penggunaannya, atas hal tersebut pemerintah sebagai Lembaga yang tertinggi yang ada disuatu negara sangat berperan penting bagi tersedianya atau terjaganya aliran Sungai yang masih bisa dimanfaatkan. Indonesia adalah salah satu negara yang memili banyak aliran Sungai disetiap daerahnya, untuk dapat terjaganya kualitas aliran Sungai dan tetap bisa dirasakan manfaatnya pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang undangan seperti yang ada dibawah ini:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik

Salah satu potensi pencemaran yang dapat terjadi sebagai dampak adanya kegiatan pembangunan tersebut adalah pencemaran air. Berdasarkan PP No 82 tahun 2001 pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan kegunaannya. Pencemaran air sering terjadi pada sumber-sumber air seperti danau, Sungai, laut dan air tanah. Fenomena baru yang terjadi akibat pencemaran air adalah meningkatnya konsumsi air mineral dalam kemasan yang terjadi baik di kota besar maupun desa terpencil karena sumber mata air untuk memenuhi kebutuhan air minum tidak lagi bebas dari pencemaran sehingga dari segi Kesehatan tidak terjamin aman untuk dikonsumsi (Keraf,2010).

Provinsi Jawa Barat dilintasi oleh 25 Sungai yang dapat dikategorikan sebagai Sungai besar maupun Sungai kecil. Masyarakat di sekitar Sungai masih menjadikan Sungai sebagai tumpuan hidup dalam memenuhi kebutuhan air untuk keperluan sehari-hari, yang tentunya kualitas air Sungai harus dalam kondisi yang aman untuk digunakan keperluan masyarakat setiap hari. Namun, dalam beberapa

tahun ini persoalan pencemaran Sungai di Jawa Barat masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan prioritas utama agar masyarakat dapat terus memanfaatkan air Sungai sebagai salah satu penunjang kehidupan sehari-hari.

Kabupaten Bekasi sendiri memiliki 16 aliran Sungai besar yaitu Sungai Citarum, Sungai Cilemahabang, Sungai Bekasi, Sungai Cikarang, Sungai Jambe, Sungai Ciherang, Sungai Belencong, Sungai Sadang, Sungai Cikedokan, Sungai Ulu, Sungai Cibee, Sungai Cipamingkis, Sungai Srengseng, Sungai Siluman, Sungai Sepak, dan Sungai Jaeran. Dari 16 aliran Sungai itu memiliki lebar yang bervariasi mulai dari 3 meter hingga 80 meter. Dari beberapa Sungai yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi, Sungai Cilemahabang menjadi salah satu Sungai yang mengalami pencemaran cukup serius. Meski tercemar, masyarakat menggunakan air dari Sungai Cilemahabang untuk kebutuhan sehari-hari seperti mencuci pakaian, mandi, mencuci peralatan rumah tangga hingga untuk mencuci beras. Aktivitas itu sudah dilakukan bertahun-tahun oleh masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Cilemahabang.

Kondisi Sungai yang digunakan sebagai saluran irigasi ini sudah bertahun-tahun berwarna hitam pekat dengan bau menyengat, dan terkadang menimbulkan gatal-gatal pada kulit manusia saat air itu digunakan oleh masyarakat. Tentunya pencemaran ini sebagian besar disebabkan oleh limbah industri, karena dampak yang ditimbulkan sangat mempengaruhi kualitas air di Sungai Cilemahabang.

Dalam hal ini, Penjabat (Pj) Bupati Bekasi Dani Ramdan juga menyoroti persoalan pencemaran Sungai yang ada di Kabupaten Bekasi melalui media online yang berjudul “16 Sungai di Kabupaten Tercemar, Masalah Pengelolaan Sampah Masih Jadi ‘PR’ Besar” (<https://www.dakta.com> Diakses pada Oktober 2023) yang menyatakan bahwa banyaknya sungai yang tercemar sampah tidak terlepas dari wilayah Kabupaten Bekasi yang berada di hilir, kondisi ini juga diperburuk oleh minimnya kesadaran masyarakat akan lingkungan. Bahkan, hampir setiap pekan ditemukan sampah hingga puluhan ton yang menutupi aliran Sungai hingga satu kilometer.

Pencemaran yang terjadi pada aliran Sungai tersebut sangat berdampak terhadap masyarakat sekitar mulai dari krisis air bersih hingga terganggunya

kesehatan masyarakat atas pencemaran tersebut. Buruknya aliran Sungai Cilemahabang bisa dilihat dari mulai menghitamnya aliran air hingga muncul bau tak sedap pada lingkungan sekitar, hal ini menyebabkan aliran Sungai Cilemahabang tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan yang bergantung pada aliran Sungai tersebut.

Aliran Sungai Cilemahabang mengalami penurunan kualitas serta terjadinya disfungsi dalam pemanfaatannya. Seperti yang disampaikan oleh (<https://www.liputan6.com> Diakses pada Oktober 2023) bahwa kondisi air yang menghitam dan mengeluarkan bau tak sedap, disebutkan sudah berlangsung selama berhari-hari, warga menduga pencemaran berasal dari limbah pabrik yang sengaja dibuang ke Sungai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Pencemaran aliran Sungai yang terjadi sangat terasa oleh masyarakat sekitar hingga mengganggu aktivitas kehidupan penduduk yang menggunakan aliran Sungai tersebut. Sedikitnya ada 3 desa dari 2 kecamatan yang terdampak pencemaran, yakni Desa Karangraharja, Desa Waluya dan Desa Karang Rahayu yang berada di Kecamatan Cikarang Utara dan Karang Bahagia.

Pencemaran aliran Sungai Cilemahabang bukan hanya dirasakan bagi penduduk yang berada dibantaran Sungai Cilemahabang itu sendiri, akan tetapi banyak yang merasakan dampak negatif dari pencemaran aliran Sungai Cilemahabang ini, sebab adanya pemanfaatan secara besar dari aliran Sungai yang diperuntukan untuk masyarakat luas yang dikelola oleh Perum Jasa Tirta (PJT).

Pengelolaan aliran Sungai Cilemahabang ini selain menjadi tanggung jawab penggunaannya, pemerintah sangat berperan penting dalam menjaga keberlangsungan fungsi aliran Sungai Cilemahabang. Perlunya peraturan serta penindakan tegas bagi pelaku pencemaran untuk dapat teratasinya permasalahan tersebut. Pencemaran yang terjadi di aliran Sungai Cilemahabang memberikan dampak luas terhadap masyarakat, atas hal tersebut pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup menjadi Lembaga yang bertanggung jawab dan mengatur dalam pengendalian pencemaran yang dituliskan dalam Perbup Nomor 62 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi. Dari Perbup tersebut dijelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Memiliki

kewenangan dalam penanganan permasalahan mengenai aspek-aspek lingkungan hidup.

Pada Perbup Nomor 62 tahun 2016 dijelaskan bahwa fungsi adanya Dinas Lingkungan Hidup terutama pada bidang pengendalian dan pemulihan lingkungan hidup dan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melaksanakan fungsi diantaranya yaitu melaksanakan pemantauan kualitas air, merumuskan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran air, pelaksanaan pencegahan pencemaran, pelaksanaan pemulihan pencemaran, pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat dan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi. Uraian tersebut menjelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup sebagai lembaga perumus kebijakan serta pengendali permasalahan yang terjadi memiliki wewenang dalam melakukan penindakan sekaligus pencegahan hal-hal yang mengakibatkan kerugian atau kerusakan dalam bidang lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil observasi, ada beberapa permasalahan dalam proses pengendalian pencemaran air Sungai Cilemahabang, diantaranya adalah :

1. Tidak adanya kebijakan ataupun produk hukum yang mengatur pengendalian pencemaran air Sungai Cilemahabang.
2. Terbatasnya SDM di Dinas Lingkungan Hidup yang menjadi penindak pelaku pencemaran air Sungai Cilemahabang.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan air sungai

Atas dasar permasalahan yang dikemukakan diatas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Cilemahabang Kabupaten Bekasi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan di ambil yaitu **“Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Cilemahabang Kabupaten Bekasi”**. Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Strategi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Cilemahabang di Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana Tantangan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Cilemahabang di Kabupaten Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis formulasi strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Cilemahabang di Kabupaten Bekasi.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis Tantangan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Cilemahabang di Kabupaten Bekasi.

Dari hasil penelitian ini, diharapkan mampu untuk memberikan pengetahuan dan informasi mengenai:

1.4 Signifikan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang pernah ada sebelumnya, maka penelitian ini membagi signifikansi penelitian menjadi dua hal, yaitu signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

1.4.1 Signifikan Akademik

Berdasarkan temuan yang peneliti lakukan selama observasi dan sejumlah data-data yang dikumpulkan, peneliti tertarik mengangkat permasalahan terkait Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Cilemahabang Kabupaten Bekasi. Adapun studi terdahulu yang menjadi rujukan peneliti adalah penelitian milik (Egi Putra dan Adil Mubarak, 2020) dengan judul Peran Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Pencemaran Air Sungai Akibat Limbah Pabrik di Kecamatan Pancung soal Kabupaten Pesisir Selatan dengan menggunakan pendekatan kualitatif menyimpulkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pencegahan pencemaran air sungai telah dilakukan secara maksimal dengan tupoksi dan regulasi yang ada meski masih banyak ditemui persoalan di lapangan. Selaku pemerintah daerah Dinas Lingkungan Hidup selama ini baru

sebatas pengawasan dan sanksi berupa pembinaan, namun secara teknis sepenuhnya dilakukan oleh pihak perusahaan sebagai pelaku usaha.

Sejauh ini persoalan mengenai dampak lingkungan di kawasan beroperasinya PT. Incasi Raya yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit masih belum terselesaikan, masih banyak persoalan yang berkaitan dengan dampak lingkungan salah satunya ialah pencemaran air sungai sehingga mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat terutama yang mencari penghidupan di sungai.

Rujukan kedua milik (Nurwahyuni, 2021) dengan judul Implementasi Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air di Home Industry Kerupuk Desa Kenanga Sindang Indramayu dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif menyimpulkan bahwa pelestarian kualitas air dan pencemaran air yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2012 belum maksimal dilakukan karena masih adanya masyarakat yang membuang limbah produksi ke sungai yang mengakibatkan air sungai tidak dapat dimanfaatkan untuk masyarakat.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh (Mutiara Elvina Sairin, Haura Atthahara dan Dadan Kurniansyah) dengan judul Responsivitas Pemerintah Daerah Dalam Pemulihan Pencemaran Limbah Cair Industri Di Sungai Citarum: Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Karawang dengan menggunakan pendekatan kualitatif menyimpulkan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti terkait Responsivitas Pemerintah Daerah Dalam Pemulihan Pencemaran Limbah Cair Industri Di Sungai Citarum: Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Karawang masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya. Berikut ini akan diuraikan kesimpulan berdasarkan dengan pisau analisis dari teori responsivitas dari (Ignor Ansof dan E.McDonneell, 1990). Dengan tiga dimensi di dalamnya, yaitu Climate (Will to Respond), Competence (Ability to Respond), dan Capacity (Volume of Response) tiga dimensi didalamnya yaitu,

1. Climate (Will to Respond)

Pada indicator Climate dalam penelitian ini, Dinas Lingkungan Hidup masih kurang tanggap dan cepat dalam merespon masalah terkait dengan pemulihan

pencemaran air Sungai oleh limbah cair industry di Kabupaten Karawang. Hal ini terlihat dari cara Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi masalah tersebut hanya pada saat masalah tersebut sudah dalam keadaan yang cukup berat. Tetapi Ketika masalah yang cenderung berulang Dinas Lingkungan Hidup lambat dalam menghadapinya

2. Competence (Ability to Respond)

Pada indikator Competence dalam penelitian ini, Dinas Lingkungan Hidup dinilai sudah memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menangani masalah pemulihan pencemaran limbah cair industri di Sungai Citarum, tetapi Dinas Lingkungan Hidup masih kurang dalam konsistensinya dalam melakukan inspeksi ke lapangan untuk mengontrol langsung keadaan Sungai Citarum serta pembuangan limbah cairnya.

3. Capacity (Volume of Response)

Pada indicator terakhir yaitu Capacity, pada indicator ini masih terdapat sumber daya manusia yang sangat kurang di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, khususnya dalam pengawasan di lapangan yaitu di aliran Sungai Citarum.

Pada penelitian ini, peneliti mengelaborasi ketiga riset tersebut untuk memperkaya literatur konseptual. Ketiga penelitian ini memiliki focus tersendiri dalam menjelaskan berbagai fenomena yang sedang terjadi. Penelitian tersebut membahas terkait aturan pemerintah serta peran dan responsivitas Dinas Lingkungan hidup dalam pengendalian pencemaran.

Pengendalian pencemaran dapat dikatakan terwujud apabila aturan yang telah diterapkan dijalankan dengan baik dan juga perlu adanya responsivitas dan peran Dinas Lingkungan Hidup. Untuk mengetahui apakah pengendalian pencemaran telah terwujud maka salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan melihat bagaimana strategi pemerintah dalam pengendalian pencemaran. Berbeda dengan ketiga penelitian di atas, penelitian ini akan berfokus pada Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Cilemahabang di Kabupaten Bekasi.

1.4.2 Signifikan Praktis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar strata satu di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam “45” Bekasi. Disamping itu, untuk Program Studi Ilmu Pemerintahan, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran serta pengetahuan baru kepada mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam “45” Bekasi tentang Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Cilemahabang Kabupaten Bekasi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan suatu kebijakan dalam pengendalian pencemaran. Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar pemerintah dapat mengendalikan pencemaran Sungai di Kabupaten Bekasi khususnya Sungai Cilemahabang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan garis besar penyusunan penelitian ini yang bertujuan untuk mempermudah dalam memahami secara keseluruhan isi dari penyusunan penelitian ini. Adapun sistematika penulisan penelitian mengenai Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Cilemahabang Kabupaten Bekasi tersusun atas sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab I ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menggambarkan ruang lingkup serta kedudukan masalah yang akan di teliti dalam bentuk uraian. Kemudian bab ini membahas perumusan masalah sebagai fokus dari penelitian yang akan dilakukan demi mencapai hasil penelitian yang diharapkan dalam tujuan penelitian. Tujuan penelitian di menungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai dari penelitian ini terhadap masalah yang sudah dirumuskan. Kegunaan penelitian yaitu menjelaskan manfaat teoritis dan praktis yang berguna bagi peneliti, pembaca, dan instansi terkait. Sistematika yang digunakan untuk mempermudah pembaca mengetahui isi dari penelitian ini secara

keseluruhan.serta kerangka teoritis mengkaji berbagai teori yang relavan dengan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam penelitian ini.

Bab II Kerangka Teori

Bab II ini menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab problematika dalam penelitian ini. Serta Kerangka pemikiran menggambarkan alur penelitian yang dikaji dengan teori yang relavan dalam penelitian,sehingga peneliti dapat merumuskan asumsi penelitian sementara.

Bab III Metode Penelitian

Bab III ini bagian berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan dan tehnik-tehnik tertentu serta pengumpulan data atau bukti untuk di analisis mengenai Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Cilemahabang Kabupaten Bekasi.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab IV ini Bagian ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Cilemahabang Kabupaten Bekasi.

Bab V Penutup

Bab V memuat penjelasan mengenai kesimpulan yang dibuat secara singkat, jelas, dan mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya,peneliti memberikan saran yang memilki isi berupa tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang diteliti baik secara teoritis maupun secara praktis. Saran praktis biasanya lebih operasional sedangkan pada aspek teoritis lebih mengarah pada pengembangan atau teori.